

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Ali Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Alwasilah, Chaedar, 2002, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Arba, HM, 2025, *Hukum Agraria (Edisi Kedua)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Ummy Ghoribah, 2023, *Pengaturan Hak Guna Usaha Atas Tanah Sebelum dan Sesudah UU Cipta Kerja*, Jambi : Salim Media.
- Bakri, Muhammad, 2011, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)* , Malang: UB Press.
- Butarbutar, Russel, 2023, *Penelitian hukum Suatu Metode, Keterhubungan Filsafat, Teori Hukum Dengan Analisis dan Penulisannya*. Sumedang: CV Mega Press Nusantara, 2023.
- Chomzah, Ali Achmad, 2013, *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Emirzon, Joni, 2021, *Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia di Era Industri 4.0 (Beberapa Catatan UU Cipta Kerja)*, Depok : Rajawali Pers.
- H. Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- HS, Salim & S Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hanitijo, Ronny S, 1990, *Metodologi Penelitian dan Yurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Harsono, Boedi, 2002, *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta : Djambatan.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan.

- Kaharuddin, 2025, *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan: Pemahaman Dasar dan Struktur Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Kusnu Goesniadhie S, 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang Undangan*, Surabaya: JP Books.
- Lutfi, Anas, 2025, *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. Jambi: Penerbit Buku Sonpedia.
- Mardani, 2024, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Jakarta : Kencana.
- Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Soedikno, 2005, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta :Liberty.
- Moleong, Lexy J, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Permana, Raihan Rafi, 2024, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pemanfaatan Energi Geothermal untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Indramayu: PT Adab Indonesia.
- Rato, Dominikus, 2021, *Dasar-dasar Ilmu Hukum : Memahami Hukum Sejak Dini*, Jakarta: Kencana.
- Rawls, John, 2011, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rizkia, Nanda Dwi & Hardi Fardiansyah, 2023, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung : Widina Media Utama
- Santoso, Urip, 2019, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana.
- Sarwono, J, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*.Yogyakarta: Penerbit kanisius.
- Soetikinjo, Imam, 1983, *Ilmu Perundang- Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumardjono, Maria SW, 2007, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

- Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*.Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sudarwan, Denim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Utsman, Sabian, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wisesa, Bayu Sanggra, 2025, *Batas Luas Hak Guna Usaha Yang Dapat Dikuasai Badan Hukum*. Klaten : Nas Media Pustaka.
- Zaman, Nurus, 2022, *Konstitusi dalam Perspektif Politik Hukum*. Surabaya: PT Scopindo Media Pustaka.

B. Tesis/Jurnal/Bahan Ajar Hukum Lainnya

- Devita, Leni & M Nur Rofiq Addiansyah, *Politik Peminggiran Masyarakat Adat Dibalik Pembangunan Ibu Kota Nusantara*, (Jurnal Masyarakat Indonesia Vol 50 No.2, 2024), 306.
<https://ejournal.brin.go.id/jmi/article/view/8845/6937>
- Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan John Rawls” dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009.
- Ferkin, Aisha Afdanty , “*Satu Langkah Memperkuat Eksistensi Masyarakat Adat: Registrasi dan Verifikasi Wilayah Adat di Kab Kutai Kartanegara*”, diakses melalui website <https://brwa.or.id/news/read/569>
- Mahfud, Muh Afif. “*The Relevance of Ronald Dworkins Theory for Creating Agrarian Justice in Indonesia*”. Dalam Jurnal Yustisia Volume 8 Number 3, 2019.
- Mahfud, Muh Afif. Kuliah Metodologi Penelitian pada tanggal 23 Oktober 2024 secara daring
- Maringka, Veren Anggelina, Benny Djaja & M.Sudirman, “Masyarakat Adat dan Hak Konstitusi Atas Tanah di Era Ibu Kota Baru (IKN)”, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Volume 3, (2 Juni 2025).
DOI:<https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i2.5086>
- Nurjaya, I Nyoman. *Antropologi Hukum : Tema, Kajian, Metodologi, dan Penggunaannya untuk Memahami Fenomena Kemajemukan Hukum Indonesia*, Makalah yang dipresentasikan di Universitas Brawijaya, 6 April 2013,

<https://www.scribd.com/document/75633051/ANTROPOLOGI-HUKUM>

Sapto Budoyo, *Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume IV No 2, Juli 2024.
<https://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/viewfile/613/563>

Silviana, Ana. Kuliah Hukum Pertanahan dan Pendaftaran Tanah pada 24 Februari 2025 di Gedung Pasca Sarjana Undip.

Wiratman, Herlambang. *Penelitian Socio-legal dan Konsekuensi Metodologisnya*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Center of Human Right Law Studies.

Yani, Margaretha Dwi & Yenny Yuniawaty. “Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Suku Balik dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara”, Unes Law Review Volume 7, Issue 3, 2025,
DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i3.2401>

Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 185/PUU-XXII/2024 tanggal 19 Mei 2024

Website Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia setneg.go.id pada tanggal 6 Mei 2025
https://setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city

Website Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dimuat pada 3 Februari 2026
<https://aman.or.id/story/masyarakat-adat-di-penajam-paser-utara-tergusur-oleh-pembangunan-ikn>

Website Ibu Kota Nusantara dimuat pada tanggal 08 Maret 2023
<https://www.ikn.go.id/pemerintah-terbitkan-pp-no-12-tahun-2023-untuk-mendorong-kemudahan-berusaha-dan-fasilitas-penanaman-modal-di-ibu-kota-nusantara>

Website hukumonline.com diakses pada tanggal 6 Mei 2025
<https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ikn-terbaru-dinilai-objektif-melalui-hukum-sampai-190-tahun-165265117a1d2a/Website>

Website Wikipedia Indonesia diakses pada 24 Oktober 2025

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemindahan_ibu_kota_indonesia_k
Nusantara](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemindahan_ibu_kota_indonesia_k_Nusantara)

Website Mahkamah Konstitusi RI diakses pada 3 Desember 2025

[https://www.mkri.id/berita/jangka-waktu-hak-atas-tanah-
dalamuikntaklagi-dua-siklus-24091](https://www.mkri.id/berita/jangka-waktu-hak-atas-tanah-dalamuikntaklagi-dua-siklus-24091)

Website Kementerian ATR/BPN dimuat pada 15 November 2025

[https://www.atrbpn.go.id/berita/Menteri-nusron-sambut-baik
putusan
mk-soal-hat-di-ikn-siap-jalankan-dan-koordinasi-instansi-terkait](https://www.atrbpn.go.id/berita/Menteri-nusron-sambut-baik-putusan-mk-soal-hat-di-ikn-siap-jalankan-dan-koordinasi-instansi-terkait)

Website Tempo dimuat pada 20 November 2025

[https://www.tempo.co/ekonomi/airlangga-bilang-dasar-hukum
hgu-ikn-akan-ditata-kembali-2091559](https://www.tempo.co/ekonomi/airlangga-bilang-dasar-hukum-hgu-ikn-akan-ditata-kembali-2091559)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria

Undang Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak
Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan
Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal
Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan
Ibu Kota Nusantara

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 tahun 2021 tentang Tata Cara
Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.